

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah Perkembangan Akuntansi di Indonesia

Tonggak sejarah perkembangan akuntansi pertama kali merupakan masa menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Pada masa itu, pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku “Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)”. Kemudian, tonggak sejarah kedua terjadi pada tahun 1984. Pada masa itu, komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian mengkodifikasikannya dalam buku “Prinsip Akuntansi Indonesia 1984” dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha.

Berikutnya pada tahun 1994, IAI kembali melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan melakukan kodifikasi dalam buku “Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Oktober 1994”. Sejak tahun 1994, IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar internasional dalam pengembangan standarnya. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan dari harmonisasi ke adaptasi, kemudian menjadi adopsi dalam rangka konvergensi dengan *International Financial Reporting Standards (IFRS)*.

Dalam perkembangannya, standar akuntansi keuangan terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan

standar baru sejak tahun 1994. Proses revisi telah dilakukan 8 kali yaitu pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, 1 September 2007, 1 Juli 2009, dan terakhir 1 Juni 2012. Adanya perubahan lingkungan global yang semakin menyatukan hampir seluruh negara di dunia dalam komunitas tunggal, yang dijumpai perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin murah, menuntut adanya transparansi di segala bidang. Standar akuntansi keuangan yang berkualitas merupakan salah satu prasarana penting untuk mewujudkan transparansi tersebut.

2.2 Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan untuk Instrumen Keuangan

Sejak tahun 1980-an, muncul perdebatan dan kritik terhadap standar akuntansi yang mengatur perlakuan terhadap instrumen keuangan. Pengukuran instrumen keuangan dengan pendekatan biaya historis (*historical cost*) dianggap sudah tidak relevan dan tidak menggambarkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya dengan semakin kompleksnya instrumen keuangan, khususnya bagi institusi perbankan (Jones, 1988). Perdebatan dan kritik muncul dengan menginginkan pengakuan dan pengukuran dengan nilai wajar pada instrumen keuangan (Jones, 1988).

Berkaitan dengan pengungkapan nilai wajar di Amerika Serikat, FASB mengeluarkan SFAS 107² pada tahun 1991 dan SFAS 119³ pada tahun 1994. Dalam hal pengakuan dan pengukuran akan nilai wajar, perubahan signifikan dilakukan dengan dikeluarkan SFAS 115⁴ pada tahun 1993 dan SFAS 133⁵ pada tahun 1998. SFAS 115 dan SFAS 133 ini diadopsi SAK menjadi PSAK 50 (1998) dan PSAK 55 (1999). Namun walaupun demikian, standar yang berlaku di Indonesia masih menggunakan model campuran yaitu biaya historis dan nilai wajar. Penggunaan nilai wajar hanya ditujukan untuk aset keuangan maupun kewajiban keuangan dengan tujuan untuk diperdagangkan (*trading*), dimana perubahan nilai wajar akan langsung mempengaruhi laporan laba rugi.

Pendekatan baru dalam pengakuan dan pengukuran nilai wajar diusulkan oleh *International Joint Working Group of Standard Setters for Financial Instrument* (JWGSS). JWGSS mengusulkan pendekatan nilai wajar sepenuhnya untuk semua jenis instrumen keuangan, khususnya pada bank, termasuk kredit (*loan*), tabungan (*deposit*), komitmen, kontrak derivatif, dan *off balance sheet* yang diakui dan diukur dengan menggunakan nilai wajar (Jackson,2000).

² SFAS 107, *Disclosure about Fair Value of Financial Instrument*

³ SFAS 119, *Disclosure about Derivative Financial Instrument and Fair Value of Financial Instrument*

⁴ SFAS 115, *Accounting for certain investment in Debt and Equity securities*

⁵ SFAS 133, *Accounting for Derivative Instrument and Hedging Activities*

Pada bulan September 2006, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan PSAK 50 dan PSAK 55 (revisi 2006) tentang instrumen keuangan yang merupakan adopsi IAS 32⁶ dan IAS 39⁷ menggantikan PSAK 50 (1998) dan PSAK 55 (1999). Sebelum adanya PSAK 50 dan PSAK 55 (2006), pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan menggunakan PSAK 10, PSAK 28 (1996), PSAK 31 (2000), PSAK 36 (1996), PSAK 42 (1998), PSAK 43 (1997), PSAK 50 (1998), dan PSAK 55 (1999). Penerapan PSAK 50 dan PSAK (2006) juga mendorong perubahan Pedoman Akuntansi Perbankan Perbankan Indonesia (PAPI) 2001 menjadi PAPI 2008 sebagai bentuk tanggapan atas perubahan peraturan tentang instrumen keuangan dalam SAK. Berikut ini akan digambarkan secara ringkas perkembangan SAK untuk instrumen keuangan di Indonesia.

Tabel 2.1

Perkembangan SAK untuk Instrumen Keuangan

Periode Tahun	Periode 1 1994 - 1998	Periode 2 1998 – 2010	Periode 3 2010 – 2012	Periode 4 2012 -
PSAK (Adopsi) yang mengatur instrumen keuangan	Instrumen keuangan diatur dalam PSAK 31 tentang Akuntansi Perbankan.	Instrumen keuangan diatur dalam PSAK 50 (1998) dan PSAK 55 (1999) hasil adopsi dari SFAS 115 (1993) dan 133 (1998).	Instrumen keuangan diatur dalam PSAK 50 (2006) dan PSAK 55 (2006) hasil adopsi dari IAS 32 (2005) dan IAS 39 (2005).	Instrumen keuangan diatur dalam PSAK 50 (2011), PSAK 55 (2011), PSAK 60 hasil adopsi dari IAS 32, IAS 39, dan IFRS 7.

⁶ IAS 32, *Financial Instrument: Disclosure and Presentation*

⁷ IAS 39, *Financial Instrument: Recognition and Measurement*

Periode Tahun	Periode 1 1994 - 1998	Periode 2 1998 – 2010	Periode 3 2010 – 2012	Periode 4 2012 -
	-	Penyempurnaan lebih detail mengenai akuntansi perbankan diatur oleh PAPI 2001.	Penyempurnaan lebih detail mengenai akuntansi perbankan diatur oleh PAPI 2008.	Penyempurnaan lebih detail mengenai akuntansi perbankan diatur oleh PAPI 2008.

Masa berlaku efektif PSAK 50 dan PSAK 55 (2006) awalnya adalah 1 Januari 2008, namun mengalami perubahan sehubungan dengan surat edaran No. 11/4/DPNP 27 Januari 2009 menjadi 1 Januari 2010 (**lihat lampiran I**). Pada dasarnya IAI sudah menetapkan PSAK 55 (Revisi 2011) menggantikan PSAK 55 (2006) sebagai bentuk penyempurnaan adopsi, namun tahun berlaku efektif pelaksanaan adalah 1 Januari 2012. Tahun berlaku efektif 1 Januari 2012 belum dapat dijadikan penelitian yang cukup akurat karena sampai saat penelitian ini dilakukan, entitas belum mengeluarkan laporan keuangan tahunan (*audited*) 2012. Laporan keuangan triwulan I,II dan III tahun 2012 tidak dapat memberikan data yang akurat sebagai perbandingan sesudah adopsi IAS 39 terhadap sebelum adopsi. Berdasarkan Exposure Draft PSAK 55 (2011), perbedaan antara PSAK 55 (2006) dan PSAK 55 (2011) tidak bersifat signifikan karena hanya menambah 1 komponen ruang lingkup kecil dan penambahan 2 reklasifikasi instrumen keuangan (**tabel 2.2**). Selain itu, PSAK 55 (2011) hanya merupakan penyempurnaan IAS 39 yang sebenarnya sudah banyak diadopsi pada PSAK 55 (2006). Oleh karena itu, PSAK 55 (2006) sudah dapat mewakili sebagai data penelitian untuk periode sesudah adopsi IAS 39. Berikut ini adalah Exposure

Draft yang dicantumkan IAI dalam revisi atas PSAK 55 (2006) menjadi PSAK 55 (2011).

Tabel 2.2
Perbedaan PSAK 55 (2006) dan PSAK 55 (2011)

Perihal	PSAK 55 (2011)	PSAK 55 (2006)
Ruang Lingkup	Pengecualian untuk <i>puttable instrumens</i> dan instrumen yang membayar bagian prorata aset neto ketika likuidasi.	(Tidak ada)
	(Tidak ada)	Pengecualian untuk kontrak pembayaran kontijensi dalam kombinasi bisnis
	(Tidak ada)	Pengecualian untuk investasi yang dilakukan oleh dana pensiun.
Definisi	Kontrak penjamin keuangan.	(Tidak ada)
Reklasifikasi	Reklasifikasi dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ke pinjaman yang diberikan dan piutang	(Tidak ada)
	Reklasifikasi dari tersedia untuk dijual ke pinjaman yang diberikan dan piutang	(Tidak ada)

Sumber : Exposure Draft PSAK 55 (2011)

2.3 Instrumen Keuangan

IAS 32 (2005) par. 11 mendefinisikan “*a financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity*”. PSAK 50 (2006) par. 07 mendefinisikan instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Sebelum

mengadopsi IAS 32 & 39, entitas menggunakan PSAK 50 & 55 (1998) sebagai standar akuntansi keuangan untuk instrumen keuangan. Pada PSAK 50 (1998) par.06, instrumen keuangan diistilahkan sebagai ‘efek’ yang memiliki definisi surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, dan unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek termasuk dalam definisi instrumen keuangan menurut PSAK 50&55 (1998). Definisi instrumen keuangan/efek menurut PSAK 50&55 (1998) lebih mengacu pada jenis atau contohnya, seperti surat pengakuan utang, saham, obligasi, dan sebagainya sedangkan menurut PSAK 50&55 (2006) lebih menekankan pada ‘kontrak’ sehingga cakupan jenis instrumen keuangan menjadi lebih luas. Instrumen keuangan terdiri dari 5 jenis yaitu aset keuangan, liabilitas keuangan, instrumen ekuitas, instrumen derivatif, dan instrumen lindung nilai.

PSAK 50 (2006) par. 07 mendefinisikan aset keuangan (*financial assets*) adalah setiap aset yang berbentuk kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, atau hak kontraktual untuk menerima atau mempertukarkan kas atau aset keuangan lain dari entitas lain. Aset keuangan dibagi menjadi 4 kategori yaitu Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi (*Fair Value Through Profit or Loss-FVPTL*), Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (*Held to maturity-HTM*), Tersedia Untuk Dijual (*Available for Sale-AFS*), dan Pinjaman yang diberikan dan Piutang (*Loan and Receivable-L&R*).

Berdasarkan PSAK 50 (2006) par. 07, liabilitas keuangan (*financial liabilities*) adalah setiap liabilitas yang berupa liabilitas kontraktual untuk

menyerahkan atau mempertukarkan kas atau aset keuangan kepada entitas lain, kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas baik itu bersifat derivatif atau non-derivatif. Liabilitas keuangan dapat dikategorikan sebagai Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi (FVTPL) dan Liabilitas lain.

PSAK 50 (2006) par. 07 mendefinisikan instrumen ekuitas (*equity instruments*) adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangkan dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen derivatif (*derivative instruments*) adalah suatu instrumen keuangan atau kontrak lain yang memiliki 3 karakteristik yaitu nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang telah ditentukan, tidak memerlukan investasi awal neto atau memerlukan investasi awal neto dalam jumlah kecil, dan diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Instrumen lindung nilai (*hedging instruments*) adalah derivatif yang ditetapkan untuk tujuan lindung nilai, atau aset keuangan nonderivatif atau liabilitas keuangan nonderivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai yang nilai wajarnya atau arus kasnya diperkirakan dapat saling hapus dengan perubahan nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindung nilai.

2.4 Perbedaan Signifikan antara Sebelum Adopsi IAS 39 dan Setelah IAS 39 menjadi PSAK 55 (2006)

Perubahan acuan IAI dalam melakukan revisi standar tentang instrumen keuangan dari beberapa standar (FAS 114, FAS 115, FAS 133, FAS 140, FAS 155, FAS 157, dan FAS 159) menjadi IAS 32 (2005) dan 39 (2005) memberikan perbedaan-perbedaan dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Perbedaan pemikiran antara FASB yang mengeluarkan SFAS dan IASB yang mengeluarkan IAS/IFRS diduga akan memunculkan beberapa perbedaan signifikan yang dapat menyebabkan perbedaan kualitas laba. Penelitian ini akan lebih memfokuskan dalam hal pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan yang terkandung dalam IAS 39 dan PSAK 55 (2006) yang diduga akan memberikan perbedaan signifikan kualitas laba. Di bawah ini akan dijabarkan mengenai perbandingan sebelum dan sesudah adopsi IAS 39 tentang perlakuan akuntansi terhadap instrumen keuangan dan memberi kemungkinan terhadap perbedaan kualitas laba yang dihasilkan.

TABEL 2.3

**Perbandingan Standar Akuntansi Untuk Instrumen Keuangan
Sebelum dan Sesudah Adopsi IAS 39 (2005) menjadi PSAK 55 (2006)**

No	Kategori	PSAK 50 (1998) diadopsi dari SFAS 133 (sebelum adopsi IAS 39)	PSAK 55 (2006) diadopsi dari IAS 39 (2005)	Keterangan
1	Klasifikasi	<p>PSAK 50 (1998) par. 07: Instrumen keuangan diklasifikasikan menjadi 3 kelompok yaitu:</p>	<p>PSAK 55 (2006) par. 08: Instrumen keuangan diklasifikasikan menjadi 4 kelompok yaitu:</p>	<p>PSAK 55 (2006) menambahkan 1 kelompok pada klasifikasi instrumen keuangan yaitu Pinjaman yang diberikan dan Piutang (<i>Loan and Receivable</i>).</p>
		1. Diperdagangkan (<i>Trading</i>)	1. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (<i>Fair value through profit or loss/FVTPL</i>)	Kelompok diperdagangkan (PSAK 50 ((1998)) dan kelompok FVTPL (PSAK 55 (2006)) memiliki maksud yang hampir sama, walaupun tidak sama persis (Perbedaan dapat dilihat pada kategori syarat klasifikasi).
		2. Dimiliki hingga jatuh tempo (<i>Held to maturity/HTM</i>)	2. Dimiliki hingga jatuh tempo (<i>Held to maturity/HTM</i>)	Tidak ada perbedaan klasifikasi.
		3. Tersedia untuk dijual (<i>Available for sale/AFS</i>)	3. Tersedia untuk dijual (<i>Available for sale/AFS</i>)	Tidak ada perbedaan klasifikasi.

No	Kategori	PSAK 50 (1998) diadopsi dari SFAS 133 (sebelum adopsi IAS 39)	PSAK 55 (2006) diadopsi dari IAS 39 (2005)	Keterangan
		-	4. Pinjaman yang diberikan dan Piutang (<i>Loan and Receivable/LR</i>)	PSAK 50 (1998) tidak mengklasifikasi kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dalam klasifikasi instrumen keuangan.
2	Syarat Klasifikasi	<p><u>Kelompok diperdagangkan</u></p> <p>PSAK 50 (1998) par. 13(a):</p> <p>a) Diklasifikasikan kelompok diperdagangkan jika: menunjukkan frekuensi pembelian dan penjualan yang sangat sering dilakukan dan dengan tujuan menghasilkan laba jangka pendek.</p>	<p><u>Kelompok Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi (FVTPL)</u></p> <p>PSAK 55 (2006) par. 08:</p> <p>Diklasifikasikan kelompok FVTPL jika memenuhi salah satu kondisi ini:</p> <p>a) Diklasifikasikan kelompok diperdagangkan (<i>trading</i>) jika: diperoleh dan dimiliki untuk tujuan dijual dan dibeli dalam waktu dekat, terdapat bukti mengenai pola ambil untung jangka pendek (<i>short-term profit taking</i>), dan merupakan derivatif.</p>	<p>Perbedaan syarat klasifikasi menurut PSAK 50 (1998) dan PSAK 55 (2006) adalah PSAK 50 (1998) hanya mencakup 1 jenis kelompok yang perubahan nilai wajarnya diakui dalam laporan laba rugi yaitu kelompok diperdagangkan (<i>trading</i>), sedangkan PSAK 55 (2006) mencakup 2 jenis yaitu kelompok diperdagangkan (<i>trading</i>) dan kelompok <i>nontrading</i> yang pengakuan awalnya telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.</p> <p>Kelompok diperdagangkan menurut PSAK 50 (1998) dan PSAK 55 (2006) memiliki maksud yang sama yaitu menunjukkan pada frekuensi pembelian dan penjualan dalam waktu dekat serta dengan tujuan keuntungan atau laba jangka pendek.</p>

No	Kategori	PSAK 50 (1998) diadopsi dari SFAS 133 (sebelum adopsi IAS 39)	PSAK 55 (2006) diadopsi dari IAS 39 (2005)	Keterangan
		-	b) <i>Nontrading</i> yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dengan ketentuan: mampu menghasilkan informasi yang lebih relevan yaitu mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengakuan dan pengukuran (<i>accounting mismatches</i>).	Perbedaan terletak pada kelompok <i>nontrading</i> yang pada saat pengakuan awalnya telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. PSAK 50 (1998) tidak mengakui jenis kelompok ini. Perbedaan ini memungkinkan kualitas laba sebelum dan sesudah adopsi IAS 39 yang berbeda karena selisih dari perubahan nilai wajar kelompok ini menurut PSAK 50 (1998) diakui dalam komponen ekuitas, namun menurut PSAK 55 (2006) diakui secara langsung pada laporan laba rugi. (Lihat juga kategori Selisih Perubahan Nilai Wajar)
		<p><u>Kelompok dimiliki hingga jatuh tempo (HTM)</u></p> <p>PSAK 50 (1998) par. 08:</p> <p>Diklasifikasikan kelompok HTM jika: perusahaan mempunyai maksud untuk memiliki efek hingga jatuh tempo.</p>	<p><u>Kelompok dimiliki hingga jatuh tempo (HTM)</u></p> <p>PSAK 55 (2006) par. 08:</p> <p>Diklasifikasikan kelompok HTM jika: dengan pembayaran tetap dan jatuh temponya telah ditetapkan serta mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki hingga jatuh tempo.</p>	Kelompok HTM sebelum dan sesudah adopsi IAS 39 memiliki maksud yang sama.

No	Kategori	PSAK 50 (1998) diadopsi dari SFAS 133 (sebelum adopsi IAS 39)	PSAK 55 (2006) diadopsi dari IAS 39 (2005)	Keterangan
		-	<p><u>Kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang (LR)</u></p> <p>PSAK 55 (2006) par. 08:</p> <p>Diklasifikasikan kelompok LR jika: dengan pembayaran tetap dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif serta tidak termasuk kelompok FVTPL dan HTM.</p>	<p>PSAK 50 (1998) tidak mengklasifikasikan kelompok LR. Namun ini diduga tidak akan memberikan perbedaan yang signifikan dalam kualitas laba (akan dipaparkan pada kategori Selisih Perubahan nilai wajar).</p>
		<p><u>Kelompok tersedia untuk dijual (AFS)</u></p> <p>PSAK 50 (1998) par. 13(b):</p> <p>Diklasifikasikan kelompok tersedia untuk dijual (AFS) jika: efek tersebut selain diklasifikasikan pada kelompok diperdagangkan atau dimiliki hingga jatuh tempo.</p>	<p><u>Kelompok tersedia untuk dijual (AFS)</u></p> <p>PSAK 55 (2006) par. 08:</p> <p>Diklasifikasikan kelompok tersedia untuk dijual (AFS) jika: nonderivatif dan tidak termasuk kelompok FVTPL, dimiliki hingga jatuh tempo, serta pinjaman yang diberikan dan piutang.</p>	<p>Kelompok AFS sebelum dan sesudah adopsi IAS 39 memiliki maksud yang sama.</p>

No	Kategori	PSAK 50 (1998) diadopsi dari SFAS 133 (sebelum adopsi IAS 39)	PSAK 55 (2006) diadopsi dari IAS 39 (2005)	Keterangan
3	Pengukuran awal	<p><u>Kelompok diperdagangkan</u></p> <p>Sebesar nilai wajar, umumnya sebesar nilai perolehan untuk memperoleh instrumen keuangan tersebut.</p>	<p><u>Kelompok Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi (FVTPL)</u></p> <p>Sebesar nilai wajar</p>	<p>Tidak ada perbedaan dalam hal pengukuran awal.</p>
		<p><u>Kelompok dimiliki hingga jatuh tempo (HTM)</u></p> <p>Sebesar nilai perolehan (<i>cost</i>)</p>	<p><u>Kelompok dimiliki hingga jatuh tempo (HTM)</u></p> <p>Sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan instrumen keuangan.</p>	<p>Secara substansial tidak ada perbedaan dalam hal pengukuran awal.</p>
		<p>-</p>	<p><u>Kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang (LR)</u></p> <p>Sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan instrumen keuangan.</p>	<p>PSAK 50 (1998) tidak mengklasifikasikan kelompok LR. Namun ini diduga tidak akan memberikan perbedaan yang signifikan dalam kualitas laba (akan dipaparkan pada kategori Selisih Perubahan nilai wajar).</p>

No	Kategori	PSAK 50 (1998) diadopsi dari SFAS 133 (sebelum adopsi IAS 39)	PSAK 55 (2006) diadopsi dari IAS 39 (2005)	Keterangan
		<p><u>Kelompok tersedia untuk dijual (AFS)</u></p> <p>Sebesar nilai wajar, umumnya sebesar nilai perolehan untuk memperoleh instrumen keuangan tersebut.</p>	<p><u>Kelompok tersedia untuk dijual (AFS)</u></p> <p>Sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan instrumen keuangan.</p>	<p>Secara substansial tidak ada perbedaan dalam hal pengukuran awal.</p>
4	<p>Selisih Perubahan Nilai Wajar</p>	<p><u>Kelompok diperdagangkan</u></p> <p>PSAK 50 (1998) par. 14:</p> <p>Laba atau rugi yang belum direalisasi atas selisih perubahan nilai wajar pada kelompok diperdagangkan harus diakui sebagai penghasilan di laporan laba rugi.</p>	<p><u>Kelompok Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi (FVTPL)</u></p> <p>PSAK 55 (2006) par. 56:</p> <p>Keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar pada kelompok FVTPL diakui pada laporan laba rugi.</p>	<p>Tidak ada perbedaan, namun tetap akan memberikan kemungkinan pada perbedaan kualitas laba sebelum dan sesudah adopsi IAS 39. Hal ini berkaitan dengan kategori syarat klasifikasi dimana PSAK 55 (2006) memperkenankan kelompok <i>nontrading</i> yang dapat diklasifikasikan sebagai FVTPL, sedangkan PSAK 50 (1998) tidak mengakui jenis ini. Selisih dari perubahan nilai wajar akan diakui di laporan laba rugi. (Lihat kembali kategori syarat klasifikasi)</p>

No	Kategori	PSAK 50 (1998) diadopsi dari SFAS 133 (sebelum adopsi IAS 39)	PSAK 55 (2006) diadopsi dari IAS 39 (2005)	Keterangan
		<p><u>Kelompok dimiliki hingga jatuh tempo (HTM)</u></p> <p>PSAK 50 (1998) par. 08:</p> <p>Pengukuran setelah pengakuan awal pada kelompok dimiliki hingga jatuh tempo (HTM) disajikan sebesar biaya perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto. Oleh karena itu, tidak ada laba atau rugi belum direalisasi atas selisih perubahan nilai wajar.</p>	<p><u>Kelompok dimiliki hingga jatuh tempo (HTM)</u></p> <p>PSAK 55 (2006) par.46 (b) dan 57:</p> <p>Kelompok dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Oleh karena itu, tidak ada laba atau rugi belum direalisasi atas selisih perubahan nilai wajar.</p>	<p>Tidak ada perbedaan pengukuran dan tidak menyebabkan perbedaan kualitas laba sebelum dan sesudah adopsi IAS 39.</p>
		<p><u>Kelompok tersedia untuk dijual (AFS)</u></p> <p>PSAK 50 (1998) par. 14:</p> <p>Laba atau rugi yang belum direalisasi atas selisih perubahan nilai wajar pada kelompok tersedia untuk dijual (AFS) harus dimasukkan sebagai komponen ekuitas yang disajikan secara terpisah.</p>	<p><u>Kelompok tersedia untuk dijual (AFS)</u></p> <p>PSAK 55 (2006) par. 56 (b):</p> <p>Keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar pada kelompok tersedia untuk dijual (AFS) diakui secara langsung dalam ekuitas yaitu melalui laporan perubahan ekuitas.</p>	<p>Tidak ada perbedaan pengukuran dan tidak menyebabkan perbedaan kualitas laba sebelum dan sesudah adopsi IAS 39.</p>

No	Kategori	PSAK 50 (1998) diadopsi dari SFAS 133 (sebelum adopsi IAS 39)	PSAK 55 (2006) diadopsi dari IAS 39 (2005)	Keterangan
		-	<p><u>Kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang (LR)</u></p> <p>PSAK 55 (2006) par.46 (b) dan 57:</p> <p>Kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang (LR) diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Oleh karena itu, tidak ada laba atau rugi belum direalisasi atas selisih perubahan nilai wajar.</p>	<p>Berkaitan dengan kategori syarat klasifikasi dimana PSAK 50 (1998) tidak mengakui jenis kelompok ini. Namun ini tidak memberikan kemungkinan besar pada perbedaan kualitas laba sebelum dan sesudah adopsi IAS 39 karena tidak adanya selisih perubahan nilai wajar yang diakui di laporan laba rugi. Kelompok LR diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.</p>

No	Kategori	PSAK 50 (1998) diadopsi dari SFAS 133 (sebelum adopsi IAS 39)	PSAK 55 (2006) diadopsi dari IAS 39 (2005)	Keterangan
5	Reklasifikasi	<p>a) PSAK 50 (1998) par.07: Pada setiap tanggal pelaporan, kelayakan pengelompokan tersebut harus dikaji kembali.</p> <p>b) PSAK 50 (1998) par. 16: Efek yang dipindahkan dari/ke kelompok diperdagangkan, laba atau rugi yang belum direalisasi diakui sebagai penghasilan dalam laporan laba rugi.</p>	<p>a) PSAK 55 (2006) par.51-55: Entitas tidak diperkenankan untuk mereklasifikasikan instrumen keuangan dari atau ke kelompok FVTPL selama instrument keuangan tersebut dimiliki atau diterbitkan.</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa PSAK 50 (1998) mengharuskan adanya pengkajian kembali kelayakan pengelompokan pada setiap tanggal pelaporan dan memperkenankan adanya reklasifikasi dari/ke kelompok diperdagangkan serta reklasifikasi dari kelompok HTM ke AFS .</p> <p>Sedangkan PSAK 55 (2006) tidak memperkenankan adanya reklasifikasi dari/ke kelompok FVTPL dan reklasifikasi dari HTM ke AFS melebihi jumlah yang tidak signifikan.</p> <p>Reklasifikasi dari/ke kelompok diperdagangkan (PSAK 50 (1998)) atau kelompok FVTPL (sesudah adopsi IAS 39) memberikan kemungkinan perbedaan kualitas laba sebelum dan sesudah adopsi IAS 39 karena selisih perubahan nilai wajar kelompok diperdagangkan (sebelum adopsi IAS 39) atau kelompok FVTPL (sesudah adopsi IAS 39) akan diakui dalam laporan laba rugi.</p>

No	Kategori	PSAK 50 (1998) diadopsi dari SFAS 133 (sebelum adopsi IAS 39)	PSAK 55 (2006) diadopsi dari IAS 39 (2005)	Keterangan
		<p>Efek utang yang dipindahkan dari kelompok HTM ke AFS, laba atau rugi yang belum direalisasi diakui dalam kelompok ekuitas secara terpisah.</p> <p>Efek utang yang ditransfer ke kelompok tersedia untuk dijual dari kelompok dimiliki untuk dijual, laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal transfer harus tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas secara terpisah, namun diamortisasi selama masa manfaat efek.</p>	<p>Jika terdapat perubahan intensi atau kemampuan entitas, instrumen keuangan kelompok HTM harus direklasifikasi menjadi kelompok AFS dan diukur pada nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat diakui secara langsung dalam ekuitas.</p> <p>Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas kelompok HTM dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan maka sisa investasi HTM harus direklasifikasi menjadi AFS (<i>tainting rule</i>) atau entitas dilarang mengklasifikasikan HTM selama 2 tahun.</p>	<p>PSAK 50 (1998) tidak mengakui <i>tainting rule</i> seperti pada PSAK 55 (2006), namun perbedaan ini diduga tidak akan memberikan kemungkinan perbedaan kualitas laba yang signifikan antara sebelum dan sesudah adopsi IAS 39 (2006)</p>

No	Kategori	PSAK 50 (1998) diadopsi dari SFAS 133 (sebelum adopsi IAS 39)	PSAK 55 (2006) diadopsi dari IAS 39 (2005)	Keterangan
6	Penurunan nilai (<i>Impairment</i>)	<p>PSAK 50 (1998) par.18:</p> <p>a) Jika penurunan nilai dinilai penurunan nilai permanen, biaya perolehan harus diturunkan hingga sebesar nilai wajarnya. Jumlah kerugian penurunan nilai harus diakui dalam laporan laba rugi.</p> <p>b) Biaya perolehan baru tidak boleh diubah kembali. Kenaikan atau penurunan atas perubahan nilai wajar harus diakui dalam komponen ekuitas.</p>	<p>PSAK 55 (2006) par.59-71:</p> <p>a) Jika terdapat bukti objektif terdapat kerugian penurunan nilai maka nilai tercatat aset dikurangi hingga sebesar nilai wajar/nilai kini estimasi arus kas masa depan. Jumlah kerugian diakui pada laporan laba rugi.</p> <p>b) Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya harus dipulihkan. Pemulihan tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat melebihi biaya perolehan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai. Jumlah pemulihan nilai diakui pada laporan laba rugi.</p>	<p>Secara substansial tidak terdapat perbedaan antara PSAK 50 (1998) dan PSAK 55 (2006) dalam hal aturan penurunan nilai. Perbedaan terletak pada aturan pemulihan atas penurunan nilai.</p> <p>PSAK 50 (1998) tidak mengatur tentang pemulihan pada penurunan nilai sehingga kenaikan atau penurunan atas nilai wajar harus dimasukkan dalam komponen ekuitas.</p> <p>PSAK 55 (2006) mengatur tentang pemulihan pada penurunan nilai. Jika kerugian penurunan nilai berkurang maka harus dipulihkan. Jumlah pemulihan nilai atas kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi.</p> <p>Perbedaan ini diduga akan memungkinkan perbedaan kualitas laba sebelum dan sesudah adopsi IAS 39 (2005) menjadi PSAK 55 (2006)</p>

2.5 Kualitas Laba

Kualitas laba merupakan konsep yang multidimensional. Tidak ada karakteristik dan ukuran yang jelas secara umum mengenai kualitas laba. Abdullah (1999) mendefinisikan laba dikatakan berkualitas jika tidak terdapat penyimpangan dari fakta sesungguhnya dalam proses pemerolehannya, meskipun secara teori tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang berlaku, sehingga keputusan yang diambil oleh penggunaanya tidak menimbulkan bias. Djatmiko (1999) mengatakan bahwa perusahaan yang melaporkan laba yang tidak diimbangi dengan arus kas yang hampir identik, dapat dikatakan memiliki laba berkualitas rendah. Kualitas laba menggambarkan hubungan antara laba usaha (*operating income*) dan arus kas dari aktivitas operasi. Semakin tinggi korelasi antara laba dan arus kas, semakin baik kualitas laba. Menurut Grahita (2001), laba akuntansi yang berkualitas adalah laba akuntansi yang mempunyai sedikit gangguan persepsian (*perceived noise*) di dalamnya dan dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Semakin besar gangguan persepsian yang terkandung dalam laba akuntansi, semakin rendah kualitas laba tersebut.

Abdelghany (2005) mengaitkan dengan manajemen laba, membagi pengukuran kualitas laba ke dalam 3 pendekatan mendasar. Pendekatan pertama adalah memfokuskan pada variabilitas laba yang berdasarkan pemikiran bahwa manajer cenderung meratakan laba. Mereka percaya bahwa investor akan lebih memilih laba yang meningkat secara halus. Kata kunci dari pendekatan ini adalah secara relatif tidak adanya variabilitas. Leuz dkk (2003) mengukur variabilitas

laba dengan menghitung rasio deviasi standar laba usaha (operasi) terhadap deviasi standar arus kas dari aktivitas operasi. Rasio yang semakin kecil menunjukkan *income smoothing* yang semakin tinggi.

Pendekatan kedua adalah diusulkan oleh Barton dan Simko (2002), di mana kualitas laba memfokuskan pada gagasan *earning surprise* yang digerakkan oleh saldo awal aset operasi rata-rata terhadap penjualan. Mereka menyediakan bukti empiris bahwa perusahaan dengan saldo awal aset operasi rata-rata yang besar terhadap penjualan cenderung melaporkan *earning surprise* yang telah ditentukan. Pendekatan ketiga memfokuskan pada rasio kas dari operasi terhadap laba. Pengukuran ini mengukur kualitas laba berdasarkan gagasan bahwa kedekatannya laba terhadap kas berarti kualitas laba yang semakin tinggi. Pendekatan ini dinyatakan oleh Penman (2001) dan merupakan teknik paling mudah untuk mengukur kualitas laba.

Berbeda dengan sebelumnya, Francis dkk (2004) mengidentifikasi 7 cara mengukur kualitas laba (atribut laba) yang secara luas telah digunakan dalam penelitian akuntansi. Tujuh karakteristik kualitas laba ini merupakan atribut dari “*accounting-based*” atau “*market-based*”, tergantung pada asumsi pokok mengenai fungsi pelaporan keuangan. Laba berbasis akuntansi mengatributkan kualitas akrual (*accrual quality*), *persistence*, daya prediksi (*predictability*), dan perataan (*smoothness*). Laba berbasis pasar mengatributkan relevansi nilai (*value relevance*), ketepatan waktu (*timeliness*), dan konservatisme (*conservatism*). Ini adalah 10 atribut yang menjadi indikator dalam menentukan kualitas laba :

a. Kualitas akrual (*accrual quality*)

Kualitas akrual merupakan pengukuran kualitas laba berdasarkan pandangan bahwa laba yang mendekati arus kas memiliki kualitas laba yang lebih baik. Dechow&Dichev (2002) mengukur kualitas laba dengan mengambil pemetaan akrual modal kerja pada periode masa lalu, periode sekarang, dan arus kas dari aktivitas operasi periode selanjutnya.

b. *Persistence*

Persistence merupakan pengukuran kualitas laba yang ditandai dengan pandangan bahwa laba yang berkelanjutan adalah laba yang lebih baik.

c. Daya Prediksi (*predictability*)

Daya prediksi didefinisikan sebagai kemampuan laba untuk memprediksi. Pengukuran kualitas laba ini berdasarkan pandangan bahwa jumlah laba yang cenderung sama tiap tahunnya merupakan kualitas laba yang tinggi.

d. Perataan (*smoothness*)

Perataan laba identik diukur dengan laba rata-rata terhadap arus kas. Pengukuran ini menggunakan arus kas sebagai konstruksi referensi untuk laba yang tidak diratakan (*unsmoothed earning*), karena asumsi bahwa arus kas tidak dapat dikelola seperti laba. Sebagai sebuah indikator kualitas laba, perataan menggerakkan pemikiran bahwa manajer menggunakan informasi pribadinya mengenai laba masa yang akan datang untuk meratakan fluktuasi sementara dan

dengan demikian mencapai jumlah laba yang dilaporkan sesuai yang telah ditentukan. Semakin rata laba mengindikasikan kualitas laba yang lebih tinggi.

e. Relevansi Nilai (*value relevance*)

Relevan nilai adalah kemampuan satu atau lebih jumlah akuntansi yang menjelaskan variasi dalam retur saham. Semakin besar tingkat variasi dalam retur, semakin kualitas laba.

f. Variabilitas laba (*earning variability*)

Variabilitas laba biasanya diukur dengan deviasi standar dari laba, yang secara statistik dan konseptual berhubungan terhadap perataan dan kualitas akrual.

g. Keinformatifan laba (*Earning informativeness*) atau *Earning Response Coefficient* (ERC)

Keinformatifan laba diukur dari koefisien *slope* yang diestimasi pada tingkat atau perubahan pada laba, atau beberapa agregat dari koefisien *slope* yang diestimasi pada kedua tingkat atau perubahan laba. Koefisien respon laba didefinisikan sebagai ukuran tingkat *abnormal return* sekuritas dalam merespon komponen *unexpected earning* yang dilaporkan perusahaan yang mengeluarkan sekuritas tersebut. Semakin tinggi ERC, semakin tinggi kualitas labanya.

h. *Earning Opacity*

Bhattacharya dkk (2003) mendefinisikan *earning opacity* sebagai sejauh mana distribusi laba yang dilaporkan gagal untuk secara akurat mencerminkan distribusi sebenarnya pada laba ekonomi yang tidak dapat diobservasi.

i. *Timeliness*

Ketepatan waktu sama dengan relevansi nilai, di mana konstruksi referensi untuk pengukuran ini adalah retur saham dan mengukurnya berdasarkan kekuatan penjelasan (*explanatory power*). Ketepatan waktu menggambarkan kemampuan laba untuk menggerakkan berita baik dan berita buruk akibat dihubungkannya dengan retur saham.

j. *Conservatism*

Ball dkk (2000) mendefinisikan konservatisme sebagai kemampuan mengubah laba akuntansi untuk menggerakkan kerugian ekonomi (diukur dengan retur saham) versus laba ekonomi (diukur dari retur saham positif). Mengikuti Basu (1997), Ball dkk mengukur konservatisme sebagai rasio koefisien *slope* pada retur negatif terhadap koefisien *slope* pada retur positif dalam *reverse regression if earning* pada retur.

Penelitian ini akan menggunakan konsep kualitas laba model Penman (2001), Leuz dkk (2003) serta Beaver dan Engel (1996). Model Penman (2001) menekankan kualitas laba pada korelasi antara laba bersih dan arus kas dari

aktivitas operasi. Semakin tinggi korelasi antara laba dan arus kas, semakin baik kualitas laba. Model Leuz dkk (2003) menekankan kualitas laba pada tingkat variabilitas laba. Model ini menghitung rasio deviasi standar laba usaha (operasi) terhadap deviasi standar arus kas dari aktivitas operasi. Semakin kecil rasio, semakin tinggi *income smoothing*, maka semakin rendah kualitas laba dan sebaliknya. Model ini sama seperti yang diungkapkan Djatmiko (1999). Model Beaver dan Engel (1996) memproksikan kualitas laba dari besarnya *discretionary accruals* dimana semakin tinggi nilai *discretionary accruals* mengindikasikan bahwa semakin besar praktik manajemen laba atau semakin rendah kualitas laba yang terdapat dalam laporan keuangan (Paiva,2010).

Dari ketiga model tersebut, model Beaver dan Engel (1996) merupakan model pengukuran kualitas laba yang paling baik karena model ini mampu memproksikan kualitas laba dengan nilai *discretionary accruals* yang memang secara khusus untuk perusahaan perbankan. Sedangkan model Penman (2001) dan model Leuz dkk (2003) merupakan model pengukuran kualitas laba secara umum yang dapat juga dipergunakan untuk perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, dan perusahaan dagang. Penelitian ini menggunakan model Penman (2001) dan model Leuz dkk (2003) untuk memberikan hasil pengujian yang lebih tepat dan diharapkan mampu mendukung hasil pengukuran model Beaver dan Engel (1996).

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji pengaruh IAS/IFRS terhadap kualitas laporan keuangan, termasuk keterkaitannya dengan pengaruh porsi FVO dalam IAS/IFRS yang semakin banyak. Barth (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “*International Accounting Standard and Accounting Quality*” membandingkan karakteristik data akuntansi antara perusahaan yang mengadopsi IAS terhadap sampel perusahaan yang tidak menerapkan IAS dalam pelaporan keuangannya. Penelitiannya membuktikan bahwa setelah adopsi IAS, perusahaan mengalami berkurangnya manajemen laba, pengakuan rugi yang lebih tepat waktu, dan peningkatan relevansi nilai data akuntansi daripada yang tidak mengadopsi. Selain itu, perusahaan yang mengadopsi IAS memiliki kualitas akuntansi yang lebih tinggi setelah adopsi dibandingkan sebelum adopsi IAS. Secara keseluruhan, penelitian ini memaparkan perbaikan dalam kualitas akuntansi dengan adopsi IAS. Penelitian Barth didukung oleh penelitian lain seperti Zhou dkk (2009) yang membuktikan bahwa perusahaan yang mengadopsi IAS menunjukkan pengurangan pada *income smoothing*.

Chen dkk (2009) meneliti dampak adopsi IFRS terhadap kualitas laporan keuangan dalam sampel perusahaan di 15 negara anggota Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan 5 indikator dalam mengukur kualitas laporan keuangan yaitu perataan laba (*income smoothing*), manajemen laba, diskresi akrual, kualitas akrual, dan ketepatan waktu pengakuan kerugian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan meningkat pada periode setelah adopsi IFRS

dibandingkan periode sebelum adopsi. Namun juga disebutkan bahwa praktik manajemen laba masih tetap ada dalam laporan keuangan pada periode setelah adopsi IFRS.

Fiechter (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “*Application of Fair Value Option under IAS 39: Effects on the Volatility of Bank Earnings*” meneliti apakah aplikasi FVO menyebabkan tingkat volatilitas laba yang berbeda selama periode waktu dari Januari 2006 sampai Juli 2007 dengan menggunakan sampel 227 bank dari 42 negara. Meskipun akuntansi nilai wajar secara umum diyakini dapat meningkatkan volatilitas laba, ditemukan bukti bahwa bank yang menerapkan FVO dapat mengurangi *accounting mismatches* dengan melaporkan tingkat volatilitas laba yang lebih rendah dibandingkan yang tidak menerapkan.

Tabel 2.4
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Hasil Penelitian
1	Barth (2005)	sesudah adopsi IAS, manajemen laba berkurang, pengakuan rugi yang lebih tepat waktu, dan peningkatan relevansi nilai dibandingkan yang tidak mengadopsi.
2	Zhou dkk (2009)	Perusahaan yang mengadopsi IAS mengalami penurunan dalam <i>earning smoothing</i> .
3	Chen dkk (2009)	Dengan 5 indikator dalam mengukur kualitas laporan keuangan yaitu perataan laba (<i>income smoothing</i>), manajemen laba, diskresi akrual, kualitas akrual, dan ketepatan waktu pengakuan kerugian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan meningkat pada periode sesudah adopsi IFRS dibandingkan periode sebelum adopsi.
4	Fiechter (2010)	bank yang menerapkan FVO dapat mengurangi <i>accounting mismatches</i> dengan melaporkan tingkat volatilitas laba yang lebih rendah dibandingkan yang tidak menerapkan.
5	Naomi (2007)	Negara yang mengadopsi IFRS meningkatkan kualitas akuntansi pelaporan keuangan
6	Gassen dan Sellhorn (2006)	Perusahaan yang mengadopsi IFRS memiliki kualitas laba yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak mengadopsi.
7	Handoyo (2011)	Tidak ada perbedaan kualitas laba antara sebelum dan sesudah adopsi IAS 32 dan 39 pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini merupakan penyempurnaan dari hasil penelitian Handoyo (2011). Terdapat beberapa hal yang tidak dapat dicapai dalam penelitian Handoyo

dan berikut ini merupakan perbedaan-perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian Handoyo.

Tabel 2.5
Perbedaan Penelitian Handoyo (2011) dan Penelitian Sekarang

No	Perihal	Handoyo (2011)	Penelitian Sekarang
1	Periode Pelaporan Laporan keuangan	Data yang digunakan adalah Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2008 (<i>audited</i>), LKT 2009 (<i>audited</i>), LKT 2010 (<i>audited</i>), dan Laporan Keuangan Triwulan 31 Maret 2011 (<i>unaudited</i>). Tidak semua data adalah LKT sehingga memberikan ketidaktepatan pada keandalan informasi.	Data yang digunakan adalah seluruhnya Laporan Keuangan Tahunan <i>audited</i> dari tahun 2008 – 2011. Data ini memberikan informasi yang lebih andal karena semua data adalah sama.
2	Metode Perhitungan Kualitas Laba	Hanya menggunakan 1 perhitungan yaitu dengan proksi <i>discretionary accruals</i> melalui model Beaver dan Engel (1996).	Menggunakan 3 perhitungan yaitu dengan proksi <i>income smoothing</i> melalui model Penman, (2001), proksi variabilitas laba melalui model Leuz dkk (2003), dan dengan proksi <i>discretionary accrual</i> melalui model Beaver dan Engel (1996).
3	Proksi <i>discretionary accrual</i> model Beaver dan Engel (1996)	<i>Nonperforming assets</i> (NPA): a) Dalam perhatian khusus b) Kurang lancar c) Diragukan d) Macet	<i>Nonperforming assets</i> (NPA): a) Kurang lancar b) Diragukan c) Macet Sesuai Peraturan Bank Indonesia

2.7 Pengembangan Hipotesis

Adopsi IAS 39 (2005) menjadi PSAK 55 (2006) memberikan perbedaan-perbedaan dalam hal pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan antara sebelum dan sesudah adopsi IAS 39 (2005) menjadi PSAK 55 (2006). *Pertama*, perbedaan dalam hal klasifikasi dan syarat klasifikasi. Sesudah adopsi IAS 39 (2005) memperkenankan adanya kelompok *nontrading* yang pada saat pengakuan awal diukur sebesar nilai wajar melalui laporan laba rugi, sedangkan sebelum adopsi IAS 39 (2005) tidak mengakui kelompok ini. *Kedua*, perbedaan dalam hal reklasifikasi. Sebelum adopsi IAS 39 (2005) memperbolehkan reklasifikasi dari/ke kelompok diperdagangkan sedangkan sesudah adopsi IAS 39 tidak memperkenankan reklasifikasi dari/ke kelompok FVTPL.

Ketiga, sebelum adopsi IAS 39 (2005) tidak mengatur tentang pemulihan pada penurunan nilai sehingga kenaikan atau penurunan atas nilai wajar dimasukkan dalam komponen ekuias. Sesudah adopsi IAS 39 (2005) mengatur tentang pemulihan atas kerugian penurunan nilai dan jumlah pemulihan diakui dalam laporan laba rugi. Diduga ketiga perbedaan ini memungkinkan perbedaan kualitas laba sebelum dan sesudah adopsi IAS 39 (2005).

Didukung penelitian terdahulu, sesudah adopsi IAS/IFRS, manajemen laba berkurang (Zhou dkk,2009), pengakuan rugi yang lebih tepat waktu, dan peningkatan relevansi nilai dibandingkan sebelum mengadopsi IAS/IFRS (Barth,2005) (Chen dkk,2009). Bank yang menerapkan FVO dapat mengurangi *accounting mismatches* dengan melaporkan tingkat volatilitas laba yang lebih

rendah dibandingkan yang tidak menerapkan (Fiechter,2010). Negara yang mengadopsi IFRS meningkatkan kualitas akuntansi akuntansi pelaporan keuangan (Naomi,2007). Perusahaan yang mengadopsi IFRS memiliki kualitas laba yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak mengadopsi (Gassen&Sellhorn,2006). Oleh karena itu, adanya perbedaan basis sebelum dan sesudah adopsi IAS 39 menjadi PSAK 55 (2006) dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini:

Ha : Terdapat perbedaan signifikan kualitas laba antara sebelum dan sesudah adopsi IAS 39 menjadi PSAK 55 (2006) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia